



PEMKAB
PONOROGO

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Layak Adaptif Karaboratif

bangga
melayani
bangsa

**PONO
ROGO
NEBAT**



RENCANA KERJA

(RENJA)

PERUBAHAN

**SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIAT DAERAH
2024**

📍 **Alamat :**

Jl. Aloon - Aloon Utara No. 9

Telp. (0352) 481482

Ponorogo - 63413

🌐 <http://ponorogo.go.id>

📘 Pemkab Ponorogo

📧 @ponorogokab

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-NYA penyusunan **Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024** dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Renja dilaksanakan dengan menghimpun semua program dan kegiatan dilingkup Sekretariat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan (TW 3 – TW 4) yang harus disesuaikan dengan program yang lebih riil dan operasional sesuai dengan situasi yang berkembang di daerah saat ini. Oleh karena itu keberhasilan mewujudkan Perubahan Rencana Kerja harus dilihat juga bagaimana asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Meskipun terdapat berbagai penyesuaian-penyesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, secara prinsip komitmen terhadap visi dan misi organisasi harus tetap dipegang teguh oleh seluruh jajaran aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Perubahan Rencana Kerja ini, disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk TW 3 – TW 4 Tahun 2024 guna mendukung program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah dan menjadi pegangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih belum sempurna, namun harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO



AGUS PRAMONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Format A	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
Format B	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Renja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jln Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, Jawa Timur 63413
Telepon 0352-481003, Faksimile 0352-481484
Laman setda.ponorogo.go.id, Pos-el setda@ponorogo.go.id

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.5/ARH/ 78 /405.03.4/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 6 (enam) bulan tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman Sekretaris Daerah beserta jajaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3.5/ARH/ 78 /405.03.4/2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tentunya terdapat perubahan sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah Daerah. Dokumen Perubahan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penyesuaian terhadap penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan SKPD untuk menyesuaikan perencanaan program kegiatan untuk KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Perubahan Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

4. Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 menyusun Perubahan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk Tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2024 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai acuan Tahun 2024 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019, Permenpan 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis masing-masing SKPD serta Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyempurnaan Ukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2024;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Perubahan Renja SKPD, Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah.

Setiap program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD Tahun 2024 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah untuk memberikan penyesuaian arah kebijakan dan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan agar terdapat sinergitas dan kontinuitas dalam perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
Format A

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
Format B

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagai salah satu dasar penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024, dilakukan evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini, dilakukan evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Berhasil atau tidaknya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun. Adapun pencapaian renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan merujuk pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) 2023 yang merupakan keseluruhan dari pelaksanaan renja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

A. BAGIAN UMUM

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN.

Capaian indikator :

Jumlah kegiatan pembinaan Anggota Korps Musik Bahana Praja Pemkab. Ponorogo, jumlah kegiatan pembinaan Anggota Paduan Suara Gita Swara Praja Pemkab. Ponorogo, jumlah kegiatan upacara yang didukung dengan iringan musik Korps Musik Bahana Praja, jumlah kegiatan upacara yang didukung dengan iringan Paduan Suara Gita Swara Praja dan jumlah kelompok pendukung kegiatan upacara pemerintah daerah yang difasilitasi.

Anggaran : Rp. 431.250.000,-

Realisasi : Rp. 179.240.000,-

Persentase : 41,56 %

II. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

Capaian indikator :

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.

Anggaran : Rp. 407.077.000,-

Realisasi : Rp. 128.087.500,-

Persentase : 59,73 %

III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Capaian indikator :

Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan dan jumlah unit elevator yang diremajakan.

Anggaran : Rp. 908.015.200,-

Realisasi : Rp. 906.126.700,-

Persentase : 99,79 %

2. Penyediaan peralatan rumah tangga

Capaian indikator :

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dilaksanakan.

Anggaran : Rp. 250.000.000,-

Realisasi : Rp. 99.838.500,-

Persentase : 48,87 %

3. Penyediaan bahan logistik kantor

Capaian indikator :

Jumlah pegawai di Lingkup Setda yang terfasilitasi makan minumannya.

Anggaran : Rp. 544.400.000,-

Realisasi : Rp. 232.663.500,-

Persentase : 42,73 %

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian indikator :

Jumlah Bagian di Lingkup Setda yang terfasilitasi kebutuhan ATKnya dan jumlah Bagian di Lingkup Setda yang terfasilitasi kebutuhan Cetak dan Penggandaannya.

Anggaran : Rp. 197.244.500,-

Realisasi : Rp. 61.811.000,-

Persentase : 31,33 %

5. Fasilitasi kunjungan tamu

Capaian indikator :

Jumlah acara yang terfasilitasi perlengkapannya dan jumlah jenis acara dalam kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar.

Anggaran : Rp. 520.000.000,-

Realisasi : Rp. 209.192.000,-

Persentase : 40,22 %

6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Capaian indikator :

Jumlah pegawai yang terfasilitasi dalam kunjungan kerja dalam daerah dan jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan jumlah konsultasi Kada, Wakada dan Pegawai yang terfasilitasi.

Anggaran : Rp. 2.202.907.000,-

Realisasi : Rp. 948.431.366,-

Persentase : 43,05 %

IV. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat-menyurat.

Capaian indikator :

Jumlah naskah dinas yang dikelola.

Anggaran : Rp. 589.120.000,-

Realisasi : Rp. 517.117.000,-

Persentase : 87,77 %

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Capaian indikator :

Jumlah jenis tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Anggaran : Rp. 2.040.492.675,-
Realisasi : Rp. 1.028.486.154,-
Persentase : 50,44 %

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Capaian indikator :

Jumlah MOU jasa cleaning service, jumlah operasional pengelolaan sumber PAD dan jumlah personil panitia dan pendukung kegiatan HUT yang terfasilitasi.

Anggaran : Rp. 1.446.100.000,-
Realisasi : Rp. 561.316.500,-
Persentase : 38,81 %

V. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Capaian indikator :

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara.

Anggaran : Rp. 1.373.000.000,-
Realisasi : Rp. 669.278.477,-
Persentase : 48,74 %

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Capaian indikator :

Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang terpelihara, jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara, jumlah jenis peralatan rumah jabatan/ dinas yang terpelihara dan jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara.

Anggaran : Rp. 545.000.000,-
Realisasi : Rp. 168.343.500,-
Persentase : 30,88 %

3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Capaian indikator :

Jumlah bangunan gedung yang terpelihara.

Anggaran : Rp. 1.325.638.425,-

Realisasi : Rp. 592.710.180,-

Persentase : 44,71 %

4. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

Capaian indikator :

Jumlah rumah jabatan/ dinas yang terpelihara.

Anggaran : Rp. 1.014.770.000,-

Realisasi : Rp. 477.300.000,-

Persentase : 47,03 %

VI. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Capaian indikator :

Jumlah penerima layanan kesehatan.

Anggaran : Rp. 1.000.000.000,-

Realisasi : Rp. 462.202.923,-

Persentase : 46,22 %

VII. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah.

Capaian indikator :

Intensitas kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi.

Anggaran : Rp. 336.000.000,-

Realisasi : Rp. 168.000.000,-

Persentase : 50 %

2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah.

Capaian indikator :

Intensitas kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi.

Anggaran : Rp. 168.000.000,-

Realisasi : Rp. 84.000.000,-

Persentase : 50 %

3. Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah.

Capaian indikator :

Jumlah tamu yang terfasilitasi kebutuhan Rumah Tangganya.

Anggaran : Rp. 3.934.925.400,-

Realisasi : Rp. 2.626.176.500,-

Persentase : 66,74 %

B. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.

Capaian indikator :

Jumlah BUMD yang dilakukan monitoring dan evaluasi.

Anggaran : Rp. 143.118.615,-

Realisasi : Rp. 45.359.720,-

Persentase : 31,69 %

2. Pengendalian dan distribusi perekonomian.

Capaian indikator :

Terlaksananya operasi bersama pemberantasan barang cukai illegal/rokok illegal dan pengendalian inflasi daerah.

Anggaran : Rp. 52.387.385,-

Realisasi : Rp. 17.757.052,-

Persentase : 33,89 %

3. Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Capaian indikator :

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan di bidang perekonomian mikro kecil.

Anggaran : Rp. 44.270.000,-

Realisasi : Rp. 7.000.000,-

Persentase : 15,81 %

II. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Capaian indikator :

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan di bidang DBHCT.

Anggaran : Rp. 250.000.000,-

Realisasi : Rp. 24.633.590,-

Persentase : 9,85 %

2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup.

Capaian indikator :

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Anggaran : Rp. 31.480.000,-

Realisasi : Rp. 31.480.000,-

Persentase : 100,00 %

C. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA

I. Kegiatan Adiministrasi Tata Pemerintahan dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan administrasi pemerintahan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen pendukung proses pemekaran kecamatan, penggabungan kecamatan dan penyesuaian kecamatan, jumlah sinergitas kinerja camat dan inovasi pelayanan kecamatan serta kelurahan, jumlah dokumen hasil

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Anggaran : Rp. 22.575.000,-

Realisasi : Rp. 4.490.000,-

Persentase : 19,88 %

2. Pengelolaan administrasi kewilayahan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen rupa bumi dan dokumen batas wilayah.

Anggaran : Rp. 125.492.800,-

Realisasi : Rp. 102.516.000,-

Persentase : 98,96 %

3. Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen LPPD, jumlah dokumen LKPJ, jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), jumlah fasilitasi izin cuti Bupati/Wakil Bupati dan jumlah fasilitasi proses administrasi PAW pimpinan dan anggota DPRD dan jumlah dokumen terlaksananya HUT Prov Jatim.

Anggaran : Rp. 234.447.200,-

Realisasi : Rp. 232.740.361,-

Persentase : 99,27 %

II. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi kerjasama dalam negeri.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen kerjasama daerah dalam negeri.

Anggaran : Rp. 26.250.000,-

Realisasi : Rp. 9.095.000,-

Persentase : 34,64 %

D. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

I. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyusunan program pembangunan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Perubahan dan jumlah dokumen Evaluasi Penyerapan dan Pengawasan Anggaran (TEPRA).

Anggaran : Rp. 43.873.610,-

Realisasi : Rp. 10.819.200,-

Persentase : 24,66 %

2. Pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen Progres Pembangunan Daerah (PPD) dan jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi Aplikasi SMEP.

Anggaran : Rp. 69.303.300,-

Realisasi : Rp. 30.391.500,-

Persentase : 43,85 %

3. Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen Hasil Pembangunan Daerah (HPD).

Anggaran : Rp. 26.744.878,-

Realisasi : Rp. 6.791.500,-

Persentase : 25,39 %

E. BAGIAN ADMINSTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual.

Capaian indikator :

Jumlah masjid penerima bantuan sosial, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan MTQ, jumlah rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, prosentase LKSA yang mengikuti taaruf dan doa bersama dan prosentase usulan hewan qurban yang di penuhi.

Anggaran : Rp. 5.071.740.200,-

Realisasi : Rp. 3.053.573.050,-

Persentase : 60,20 %

2. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial.

Capaian indikator :

Jumlah penerima bantuan sosial masyarakat dan prosentase proposal hibah yang diverifikasi dan di monitor tepat waktu.

Anggaran : Rp. 3.978.132.000,-

Realisasi : Rp. 2.871.614.266,-

Persentase : 72,18 %

3. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat.

Capaian indikator :

Jumlah penyelenggaraan hari besar nasional dan keagamaan, jumlah jamaah haji yang terfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan dan jumlah jamaah yang di berangkatkan.

Anggaran : Rp. 3.616.642,600,-

Realisasi : Rp. 1.708.676.492,-

Persentase : 47,25 %

F. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), jumlah dokumen RKA/ RKAP dan DPA/ DPAP, jumlah dokumen proses bisnis, jumlah dokumen cascading/pohon kinerja dan jumlah dokumen perjanjian kinerja.

Anggaran : Rp. 172.788.750,-

Realisasi : Rp. 163.611.804,-

Persentase : 94,69 %

2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen LKj Setda, jumlah dokumen laporan SPIP, jumlah laporan evaluasi Renja dan jumlah dokumen laporan keuangan Sekretariat Daerah.

Anggaran : Rp. 187.548.855,-

Realisasi : Rp. 56.265.500,-

Persentase : 30,00 %

3. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Capaian indikator :

Jumlah laporan capaian kinerja Setda.

Anggaran : Rp. 56.992.500,-

Realisasi : Rp. -

Persentase : 0 %

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen SPJ yang terverifikasi dan jumlah dokumen SPM yang dibuat.

Anggaran : Rp. 104.156.100,-

Realisasi : Rp. 70.113.000,-

Persentase : 67,31 %

2. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Capaian indikator :

Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan.

Anggaran : Rp. 15.269.532.000,-

Realisasi : Rp. 10.289.810.075,-

Persentase : 67,39 %

III. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Capaian indikator :

Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menerima gaji dan tunjangan.

Anggaran : Rp. 797.309.000,-

Realisasi : Rp. 462.202.923,-

Persentase : 57,97 %

G. BAGIAN HUKUM

I. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

Capaian indikator :

Jumlah produk hukum daerah yang diselesaikan tepat waktu dan jumlah laporan hasil koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Anggaran : Rp. 306.508.500,-

Realisasi : Rp. 142.646.840,-

Persentase : 46,54 %

2. Fasilitasi bantuan hukum.

Capaian indikator :

Prosentase permasalahan hokum yang diselesaikan dan jumlah dokumen laporan RAHHAM.

Anggaran : Rp. 142.959.500,-

Realisasi : Rp. 71.146.020,-

Persentase : 49,76 %

3. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum.

Capaian indikator :

Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan dan jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum.

Anggaran : Rp. 37.916.000,-

Realisasi : Rp. 20.020.100,-

Persentase : 52,80 %

H. BAGIAN ORGANISASI

I. Kegiatan Penataan Organisasi dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

Capaian Indikator :

Jumlah dokumen analisis beban kerja perangkat daerah, jumlah dokumen analisis jabatan perangkat daerah dan jumlah dokumen evaluasi kelembagaan.

Anggaran : Rp. 135.500.000,-

Realisasi : Rp. 38.539.000,-

Persentase : 28,44 %

2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

Capaian Indikator :

Jumlah dokumen IKM, jumlah dokumen SOP, jumlah dokumen SPP, jumlah ID Card PNS yang dicetak, jumlah tanda jabatan, jumlah tanda pangkat dan jumlah unit pelayanan yang difasilitasi penyusunan inovasi pelayanan publik.

Anggaran : Rp. 154.885.000,-

Realisasi : Rp. 9.865.040,-

Persentase : 6,36 %

3. Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Capaian Indikator :

Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja, jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB dan jumlah peserta teknis/ sosialisai peningkatan kinerja.

Anggaran : Rp. 191.546.000,-

Realisasi : Rp. 129.758.840,-

Persentase : 67,74 %

I. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

I. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi keprotokolan.

Capaian Indikator :

Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi pelayanan keprotokolan.

Anggaran : Rp. 211.973.200,-

Realisasi : Rp. 157.140.000,-

Persentase : 74,13 %

2. Fasilitasi komunikasi pimpinan.

Capaian Indikator :

Jumlah dokumen informasi perkembangan pemerintahan.

Anggaran : Rp. 128.550.000,-

Realisasi : Rp. 61.448.000,-

Persentase : 47,80 %

3. Pendokumentasian tugas pimpinan.

Capaian indikator :

Jumlah dokumen peliputan kegiatan Pimpinan Daerah.

Anggaran : Rp. 1.370.121.700,-

Realisasi : Rp. 425.160.500,-

Persentase : 31,03 %

J. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

I. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Capaian Indikator :

Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan tepat waktu, jumlah laporan pengadaan barang dan jasa dan jumlah dokumen laporan fisik proses PBJ.

Anggaran : Rp. 465.193.507,-

Realisasi : Rp. 185.831.930,-

Persentase : 39,94 %

2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Capaian Indikator :

Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan PBJ secara elektronik (e-procurement) dan jumlah permintaan/ perubahan user ID penyedia dan pengelola.

Anggaran : Rp. 37.728.300,-

Realisasi : Rp. 14.189.353,-

Persentase : 37,61 %

3. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Capaian indikator :

Jumlah SDM barang/ jasa yang mempunyai sertifikat keahlian dan prosentase sengketa pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan.

Anggaran : Rp. 38.482.550,-

Realisasi : Rp. 14.775926,-

Persentase : 38,40 %

Rincian hasil evaluasi renja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel A

FORMAT A.

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=6+12	14=13/5x100	15							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					250.142.929.551		60.559.951.513		52.723.096.750												
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90%	106.875.077.728	90%	20.234.129.699	90%	17.395.613.200		5.144.292.448		4.196.798.929		0	9.341.091.377	1	29.575.221.076	100,00%	27,67%	Asisten III
			Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90%	3.870.750.000	90%	618.357.266	90%	481.931.000		157.012.840		21.150.040		0	178.162.880	1	796.520.146	100,00%	20,58%	

			Nilai survey kepuasan masyarakat at pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	90%	3.086.814.500	90%	1.024.791.487	90%	1.710.644.900	159.883.500	483.865.000				0	643.748.500	1	1.668.539.987	100,00%	54,05%	
			Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	101.030.181.065	95%	21.101.536.782	95%	18.369.661.705	5.757.942.031	6.506.086.372				0	12.264.028.403	1	33.365.565.185	100,00%	33,03%	
	Terlaksananya dokumen Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95%	1.481.471.140	95%	288.836.383	95%	360.337.605	0	219.877.304				0	219.877.304	1	508.713.687	100,00%	34,34%	Baperkeu
	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	862.950.800	13	159.091.258	13	172.788.750		12	163.611.804			12	163.611.804	25	322.703.062	192,31%	37,40%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	397.858.340	4	72.752.625	4	187.548.855		2	56.265.500			2	56.265.500	6	129.018.125	150,00%	32,43%	

		Adminis trasi Kepega waian Perang kat Daerah	Prosentas e administr asi kepegawa ian tepat waktu	100 %	1.638.000. 000	100 %	850.306.000	100 %	407.077.000		53.772.50 0		74.315.000					128.087.500		978.393.5 00		59,73%	Umum	
		Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pannya	8	1.638.000.0 00	8	850.306.000	8	407.077.000	2	53.772.500	3	74.315.000					5	128.087.500	1 3	978.393.50 0	162,50%	59,73%	
		Adminis trasi Umum Perang kat Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawa ian, perlengka pan dan rumah tangga	90%	23.524.224 .155	90%	5.614.710.9 36	90%	4.622.566.7 00		1.080.829 .030		1.377.234.036					0	2.458.063.0 66	1	8.072.774 .002	100,00%	34,32%	Umum
		Penyedia an Peralata n dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	5	7.243.200.0 00	5	596.475.500	5	908.015.200	1	79.922.200	1	826.204.500					2	906.126.700	7	1.502.602. 200	140,00%	20,75%	
		Penyedia an Peralata n Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	950.000.000	4	364.435.000	4	250.000.000	1	99.838.500	0	-					1	99.838.500	5	464.273.50 0	125,00%	48,87%	
		Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	6.256.000.0 00	12	928.878.300	12	544.400.000	3	142.801.50 0	3	89.862.000					6	232.663.500	1 8	1.161.541. 800	150,00%	18,57%	
		Penyedia an Barang Cetakan dan Pengganda daan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda daan	4	1.437.226.3 84	4	261.230.800	4	197.244.500	1	45.873.000	1	15.938.000					2	61.811.000	6	323.041.80 0	150,00%	22,48%	

			an yang Disediakan																			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	2.965.350.000	12	937.398.900	12	520.000.000	3	201.102.000	3	8.090.000			6	209.192.000	18	1.146.590.900	150,00%	38,67%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	4.213.447.771	600	2.448.400.736	600	2.202.907.000	153	511.291.830	242	437.139.536			395	948.431.366	995	3.396.832.102	165,83%	80,62%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90	51.261.168.568	90	3.045.570.883	90	4.075.712.675		1.520.612.160		576.607.494			0	2.097.219.654		5.142.790.537		10,03%	Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	320.474.140	40	9.700.000	40	589.120.000	5	480.715.000	5	26.702.000			10	507.417.000	50	517.117.000	125,00%	161,36%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	45.450.694.428	12	1.858.378.051	12	2.040.492.675	3	691.359.660	3	337.126.494			6	1.028.486.154	18	2.886.864.205	150,00%	6,35%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	5.490.000.000	12	1.177.492.832	12	1.446.100.000	3	348.537.500	3	212.779.000			6	561.316.500	18	1.738.809.332	150,00%	31,67%	

			yang Disediakan																		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik	4 Kelompok	24.486.685.005	4 Kelompok	5.302.407.880	4 Kelompok	4.258.408.425	902.722.258		1.004.909.899			0	1.907.632.157	7.210.040.037		29,44%	Umum	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	5.550.007.200	42	1.586.409.089	42	1.373.000.000	10	122.517.578	42	546.760.899			52	669.278.477	94	2.255.687.566	223,81%	40,64%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	2.650.000.000	20	395.681.400	20	545.000.000	5	82.196.500	5	86.147.000			10	168.343.500	30	564.024.900	150,00%	21,28%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	8.700.000.000	5	1.371.374.840	5	1.325.638.425	7	386.564.680	7	206.145.500			14	592.710.180	19	1.964.085.020	380,00%	22,58%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	7.586.677.805	3	1.948.942.551	3	1.014.770.000	3	311.443.500	3	165.856.500			6	477.300.000	9	2.426.242.551	300,00%	31,98%

		n Lainnya																				
		Administrasi Keuangan dan Operasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	95%	5.134.500.000	95%	2.253.203.693	95%	1.797.309.000		685.480.341		691.420.183			0	1.376.900.524	1	3.630.104.217	100,00%	70,70%	Baperkeu / Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	3.884.500.000	2 Orang/Bulan	774.756.959	2 Orang/Bulan	797.309.000	2 Orang/Bulan	262.412.511	2 Orang/Bulan	199.790.412				462.202.923		1.236.959.882		31,84%	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	1.250.000.000	4	1.478.446.734	4	1.000.000.000	4	423.067.830	4	491.629.771			8	914.697.601	12	2.393.144.335	300,00%	191,45%	
		Fasilitasi Kerumahaan Sekretariat Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90%	4.965.000.000	90%	5.034.207.000	90%	4.438.925.400		1.640.129.000		1.238.047.500			0	2.878.176.500		7.912.383.500		159,36%	Umum

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	1.500.000.000	12	336.000.000	12	336.000.000	3	84.000.000	3	84.000.000				6	168.000.000	18	504.000.000	150,00%	33,60%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	900.000.000	12	168.000.000	12	168.000.000	3	42.000.000	3	42.000.000				6	84.000.000	18	252.000.000	150,00%	28,00%	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150	2.565.000.000	150	4.530.207.000	150	3.934.925.400	35	1.514.129.000	40	1.112.047.500				75	2.626.176.500	225	7.156.383.500	150,00%	279,00%	
	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)	47	3.870.750.000	47	618.357.266	47	481.931.000		157.012.840		21.150.040				0	178.162.880		796.520.146		20,58%	Umum
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	506.235.750	1	235.326.278	1	135.500.000		20.454.000		18.085.000				0	38.539.000	1	273.865.278	100,00%	54,10%	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	912.750.000	1	126.722.397	1	154.885.000		7.400.000		2.465.040				0	9.865.040	1	136.587.437	100,00%	14,96%	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	2.451.764.250	1	256.308.591	1	191.546.000		129.158.840		600.000				0	129.758.840	1	386.067.431	100,00%	15,75%	

		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	85%	3.086.814.500	85%	1.024.791.487	85%	1.710.644.900	159.883.500	483.865.000					643.748.500	1.668.539.987		54,05%	Proko pim		
		Fasilitasi Keptokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keptokolan	360	1.420.187.000	360	543.059.187	360	211.973.200	98	92.778.000	140	64.362.000			238	157.140.000	598	700.199.187	166,11%	49,30%	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360	638.050.500	360	314.907.800	360	128.550.000	98	30.800.000	140	30.648.000			238	61.448.000	598	376.355.800	166,11%	58,99%	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360	1.028.577.000	360	166.824.500	360	1.370.121.700	98	36.305.500	140	388.855.000			238	425.160.500	598	591.985.000	166,11%	57,55%	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan fasilitas kehidupan bermasyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100%	4.162.579.330	100%	774.645.530	100%	408.765.000	298.929.039	49.912.322					348.841.361	1.123.486.891		26,99%	Asisten I		
			Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92%	18.366.425.750	92%	14.551.540.899	92%	12.666.514.800	3.788.197.415	7.516.435.743					11.304.633.158	25.856.174.057		140,78%			

			Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	80%	2.894.854.000	80%	500.230.664	80%	487.384.000	111.906.340	121.906.620					233.812.960	734.043.624	25,36%	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu	100%	3.912.579.330	100%	739.954.027	100%	382.515.000	298.929.039	40.817.322					339.746.361	1.079.700.388	27,60%	Tapem
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	700.200.000	10 Dokumen	237.067.785	10 Dokumen	22.575.000	2.600.000	1.890.000					4.490.000	241.557.785	34,50%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	1.456.879.330	2 Dokumen	237.067.785	2 Dokumen	125.492.800	102.516.000	0					102.516.000	339.583.785	23,31%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	1.755.500.000	15 Dokumen	265.818.457	15 Dokumen	234.447.200	193.813.039	38.927.322					232.740.361	498.558.818	28,40%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase koordinasi dibidang kesra dan kemasayarakatan yang ditindaklanjuti	92%	18.366.425.750	92%	14.551.540.899	92%	12.666.514.800	3.788.197.415	7.516.435.743					11.304.633.158	25.856.174.057	140,78%	Kesra

		Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	9.967.380.750	4 Dokumen	7.353.736.591	4 Dokumen	5.071.740.200		3.053.573.050		3.670.769.350					6.724.342.400		14.078.078.991		141,24%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	4.223.385.000	3 Dokumen	4.899.179.964	3 Dokumen	3.978.132.000		229.250.619		2.642.363.647					2.871.614.266		7.770.794.230		183,99%	

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	4.175.660.000	3 Dokumen	2.298.624.344	3 Dokumen	3.616.642.600		505.373.746		1.203.302.746					1.708.676.492		4.007.300.836		95,97%	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%	2.894.854.000	100%	500.230.664	100%	487.384.000		111.906.340		121.906.620					233.812.960		734.043.624		25,36%	Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1420	1.272.250.000	1420	336.378.542	1420	306.508.500	436	45.815.320	179	96.831.520				615	142.646.840	2035	479.025.382	143,31%	37,65%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3	1.255.203.000	3	93.863.422	3	142.959.500	1	58.177.420	1	12.968.600				2	71.146.020	5	165.009.442	166,67%	13,15%	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	1315	367.401.000	1315	69.988.700	1315	37.916.000	436	7.913.600	179	12.106.500				615	20.020.100	1930	90.008.800	146,77%	24,50%	

		Informasi Hukum	Didokumentasi																	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	250.000.000	100%	34.691.503	100%	26.250.000	0	9.095.000				9.095.000	43.786.503	17,51%	Tapem		
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	34.691.503	20 Dokumen	26.250.000	0	9.095.000				9.095.000	43.786.503	17,51%			
3	Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90%	5.624.262.250	90%	1.030.161.727	90%	541.404.357	87.137.516	127.659.693				214.797.209	1.244.958.936	22,14%	Asisten II		
			Prosentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	90%	3.203.359.928	90%	540.921.882	90%	521.256.000	49.129.982	77.100.380				126.230.362	667.152.244	20,83%			
			Prosentase realisasi belanja pengadaan	89%	1.028.625.000	89%	183.635.577	89%	139.921.788	24.597.200	23.905.000				48.502.200	232.137.777	22,57%			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang	100%	1.918.359.928	100%	463.181.683	100%	239.776.000	41.115.982	29.000.790				70.116.772	533.298.455	27,80%	Ekonomi		

		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	470.800.000	12	82.116.600	12 Laporan	69.303.300	3	16.085.000	3	14.806.500				6	30.891.500	18	113.008.100	150,00%	24,00%		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	210.275.000	12	33.132.977	12 Laporan	26.744.878	3	3.108.000	3	3.683.500				6	6.791.500	18	39.924.477	150,00%	18,99%		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %	5.624.262.250	100 %	1.030.161.727	100 %	541.404.357		87.137.516		127.659.693					214.797.209		1.244.958.936		22,14%	BPBJ	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	4.574.850.000	1 Dokumen	893.495.465	1 Dokumen	465.193.507		74.355.340		111.476.590					185.831.930		1.079.327.395		23,59%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	524.043.000	1 Dokumen	52.900.920	1 Dokumen	37.728.300		8.588.143		5.601.210						14.189.353		67.090.273		12,80%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	525.369.250	100 Orang	83.765.342	100 Orang	38.482.550		4.194.033		10.581.893						14.775.926		98.541.268		18,76%	

		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Prosentase permasalahan/isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan	100 %	1.285.000.000	100 %	77.740.199	100 %	281.480.000		8.014.000		48.099.590				56.113.590		133.853.789		10,42%	Ekonomi
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	905.000.000	1 Dokumen	15.540.199	1 Dokumen	250.000.000		8.014.000		16.619.590				24.633.590		40.173.789		4,44%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	62.200.000	1 Dokumen	31.480.000				31.480.000				31.480.000		93.680.000		24,65%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				
		Predikat Kinerja																				

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah disediakan
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kebutuhan anggaran yang tersedia kurang mencukupi sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran di Renja perubahan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Penyesuaian anggaran untuk melaksakana kegiatan di TW 3 - 4
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Perencanaan kegiatan dan anggaran harus tepat waktu dan sesuai kebutuhan

Dengan adanya Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 pada masing-masing Bagian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang masih dihadapi Sekretariat Daerah akan dilakukan beberapa upaya melalui Perubahan Renja Sekretariat Daerah tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Pengelola Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian selaku penanggungjawab Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Peningkatan Kinerja melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Perencanaan, Kebijakan dan Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Bagian.
4. Peningkatan Sistem Informasi, Monitoring, Pengendalian, Pelaporan, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Informatif, Partisipatif, Transparan, Efektif dan Efisien serta Akuntabel.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala. Untuk mendukung tujuan tersebut maka berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dan dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi Kabupaten Ponorogo adalah Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis , Elok , Bergas , Amanah , dan Takwa)

Misi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah , Tangkas, dan Responsif;

Misi yang sesuai dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah Misi 4.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
VISI : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa)					
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif					
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Nilai LPPD 3. Nilai SAKIP 4. % IKM PD yang mendapatkan nilai Baik	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan fasilitasi kehidupan bermasyarakat	1. Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
				2. Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				3. Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum
			2. Meningkatnya stabilitas perekonomian dan transparansi, efektifitas serta efisiensi pengadaan barang dan jasa	1. Pengendalian Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA
				2. Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				3. Prosentase realisasi belanja pengadaan	Bagian Administrasi Pembangunan
			3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	1. Prosentase unsur pelayanan dengan nilai baik	Bagian Organisasi
				2. Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	Bagian Organisasi

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang sesuai dengan sasaran yang ingin diwujudkan Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ponorogo pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Format B

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perangkat Daerah Tahun 2024 Kab. Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggung jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Satuan	Renja 2024	APBD 2024	Penjabaran APBD 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90	90	90	%	9.872.897.000	17.395.613.200	17.395.613.200	17.395.613.200	Asisten III
				Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja (LKj) dengan benar dan tepat waktu	90	90	90	%	481.931.000	481.931.000	481.931.000	481.931.000	

				Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	90	90	90	%	1.710.644.900	1.710.644.900	1.710.644.900	1.710.644.900	
				Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	90	90	90	%	18.264.460.705	18.369.661.705	18.369.661.705	18.369.661.705	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	Prosentase dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu	95	95	95	%	360.337.605	360.337.605	360.337.605	360.337.605	Baperkeu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	13	Dokumen	172.788.750	172.788.750	172.788.750	172.788.750	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	Laporan	187.548.855	187.548.855	187.548.855	187.548.855	
		Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Setda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Setda									

		Perangkat Daerah												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	95	95	95	%	16.632.214.100	15.804.938.100	15.804.938.100	15.804.938.100	Baperkeu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	175	164	Orang/bulan	15.269.532.000	15.269.532.000	15.269.532.000	15.269.532.000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	20	20	Dokumen	1.258.526.000	431.250.000	431.250.000	431.250.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4300	4300	4300	Dokumen	104.156.100	104.156.100	104.156.100	104.156.100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu	Prosentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100	100	100	%	324.600.000	407.077.000	407.077.000	407.077.000	Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	8	8	Paket	324.600.000	407.077.000	407.077.000	407.077.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90	90	90	%	2.125.201.000	4.622.566.700	4.622.566.700	4.622.566.700	Umum
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Terfasilitasi Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Gedung/Kantor Yang Terfasilitasi Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	5	Paket	155.500.000	908.015.200	908.015.200	908.015.200	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	Paket	25.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	Paket	544.400.000	544.400.000	544.400.000	544.400.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	Paket	195.742.128	197.244.500	197.244.500	197.244.500	

		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	Laporan	561.500.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	600	600	Laporan	643.058.872	2.202.907.000	2.202.907.000	2.202.907.000	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	4	0	0	unit	50.000.000	0	0	0	Umum
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang dilaksanakan	Jumlah paket mebeleur yang dilaksanakan	4	0	0	unit	50.000.000	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90	90	90	%	3.303.296.000	4.075.712.675	4.075.712.675	4.075.712.675	Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40	40	40	Laporan	16.696.000	589.120.000	589.120.000	589.120.000	

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.840.500.000	2.040.492.675	2.040.492.675	2.040.492.675	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	Laporan	1.446.100.000	1.446.100.000	1.446.100.000	1.446.100.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik	Jumlah Kelompok Asset Tetap dalam kondisi baik	4	4	4	Kelompok	3.163.400.000	4.258.408.425	4.258.408.425	4.258.408.425	Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	42	42	Unit	673.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	Unit	420.000.000	545.000.000	545.000.000	545.000.000	

		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	Unit	1.255.630.000	1.325.638.425	1.325.638.425	1.325.638.425	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	Unit	814.770.000	1.014.770.000	1.014.770.000	1.014.770.000	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	Prosentase penyerapan anggaran tepat waktu	95	95	95	%	947.309.000	1.797.309.000	1.797.309.000	1.797.309.000	Baperkeu/ Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	Orang/Bulan	797.309.000	797.309.000	797.309.000	797.309.000	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	4	4	Orang	150.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	

		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	Nilai survey kepuasan pelayanan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga	90	90	90	%	1.281.000.000	4.438.925.400	4.438.925.400	4.438.925.400	Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	12	Paket	336.000.000	336.000.000	336.000.000	336.000.000	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	12	12	Paket	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150	150	150	Paket	777.000.000	3.934.925.400	3.934.925.400	3.934.925.400	
		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menyusun Laporan Kinerja (LKj)	47	47	47	Perangkat daerah	481.931.000	481.931.000	481.931.000	481.931.000	Organisasi

		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	1	1	Dokumen	135.500.000	135.500.000	135.500.000	135.500.000	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	1	1	Laporan	154.885.000	154.885.000	154.885.000	154.885.000	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	Dokumen	191.546.000	191.546.000	191.546.000	191.546.000	
		Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan	85	85	85	%	1.710.644.900	1.710.644.900	1.710.644.900	1.710.644.900	Prokopim
		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	360	360	360	Laporan	211.973.200	211.973.200	211.973.200	211.973.200	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	360	360	360	Laporan	128.550.000	128.550.000	128.550.000	128.550.000	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	360	360	360	Laporan	1.370.121.700	1.370.121.700	1.370.121.700	1.370.121.700	

		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan data capaian kinerja untuk penyusunan LPPD secara tepat waktu	100	100	100	%	408.765.000	408.765.000	408.765.000	408.765.000	Asisten I
				Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Prosentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	92	92	92	%	12.666.514.800	12.666.514.800	12.666.514.800	12.666.514.800	
				Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	80	80	80	%	487.384.000	487.384.000	487.384.000	487.384.000	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun LPPD dan SPM dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	%	382.515.000	382.515.000	382.515.000	393.015.000	Tapem
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10	10	10	Dokumen	22.575.000	22.575.000	22.575.000	16.575.000	

		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	2	2	Dokumen	125.492.800	125.492.800	125.492.800	119.492.800	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	15	15	Dokumen	234.447.200	234.447.200	234.447.200	256.947.200	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase koordinasi dibidang kesra dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Prosentase koordinasi dibidang kesra dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	92	92	92	%	12.666.514.800	12.666.514.800	12.666.514.800	12.666.514.800	Kesra
		Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	4	4	Dokumen	5.071.740.200	5.071.740.200	5.071.740.200	5.071.740.200	

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3	3	Dokumen	3.978.132.000	3.978.132.000	3.978.132.000	3.978.132.000	
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	3	3	Dokumen	3.616.642.600	3.616.642.600	3.616.642.600	3.616.642.600	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100	100	100	%	487.384.000	487.384.000	487.384.000	487.384.000	Hukum
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1420	1420	1420	Dokumen	306.508.500	306.508.500	306.508.500	306.508.500	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	2	2	Kasus	142.959.500	142.959.500	142.959.500	142.959.500	

		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1315	1315	1315	Dokumen	37.916.000	37.916.000	37.916.000	37.916.000	
		Fasilitas Kerjasama Daerah	Fasilitas Kerjasama Daerah	Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	Prosentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100	100	100	%	26.250.000	26.250.000	26.250.000	15.750.000	Tapem
		Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	20	20	20	Dokumen	26.250.000	26.250.000	26.250.000	15.750.000	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE	90	90	90	%	541.404.357	541.404.357	541.404.357	541.404.357	Asisten II
				Prosentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Prosentase Rumusan Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	90	90	90	%	521.256.000	521.256.000	521.256.000	521.256.000	
				Prosentase realisasi belanja pengadaan	Prosentase realisasi belanja pengadaan	89	89	89	%	139.921.788	139.921.788	139.921.788	139.921.788	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan	Prosentase permasalahan di bidang kebijakan perekonomian yang terselesaikan	100	100	100	%	239.776.000	239.776.000	239.776.000	239.776.000	Ekonomi

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	1	1	Dokumen	143.118.615	143.118.615	143.118.615	143.118.615	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	1	1	Laporan	52.387.385	52.387.385	52.387.385	52.387.385	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	1	1	Dokumen	44.270.000	44.270.000	44.270.000	44.270.000	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Prosentase Perangkat Daerah yang penyerapan dana APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	90	90	90	%	139.921.788	139.921.788	139.921.788	139.922.138	Adbang
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	14	14	14	Dokumen	43.873.610	43.873.610	43.873.610	43.860.960	

		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	12	12	Laporan	69.303.300	69.303.300	69.303.300	69.303.300	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	12	Laporan	26.744.878	26.744.878	26.744.878	26.757.878	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Prosentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	100	100	100	%	541.404.357	541.404.357	541.404.357	541.404.357	BPBJ
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	Dokumen	465.193.507	465.193.507	465.193.507	465.193.507	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	1	1	Dokumen	37.728.300	37.728.300	37.728.300	37.728.300	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	Orang	38.482.550	38.482.550	38.482.550	38.482.550	

		Pemantau n Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Prosentase permasalahan /isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan	Prosentase permasalahan /isu strategis di bidang sumber daya alam yang terselesaikan	100	100	100	%	281.48 0.000	281.48 0.000	281.480.00 0	281.480.00 0	Ekonom i
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	1	1	Dokume n	250.000. 000	250.000. 000	250.000.000	250.000.000	
		Koordinasi,Si nkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambanga n dan Lingkungan Hidup	Koordinasi,Sinkro nisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	1	1	Dokume n	31.480.0 00	31.480.0 00	31.480.000	31.480.000	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki dalam institusi dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO, M.M.